

BAB V
KESENJANGAN GENDER DALAM PROSES REKRUTMEN LEGISLATIF DI
JAWA TENGAH

Demokrasi selalu menimbulkan paradoks. Disatu sisi, demokrasi mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang untuk berkompetisi dan berkonflik, namun pada sisi yang berbeda, demokrasi juga mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus antar partai, antar calon legislatif dan antar pemilih. Ini bertolak belakang dengan pernyataan Anne Phillips (1998) dalam bukunya, yang menegaskan konsep *the politics of presence* atau politik kehadiran. Phillips berpendapat bahwa anggota dari suatu grup masyarakat yang termarginalisasi, seharusnya secara fisik terwakili dalam lembaga legislatif dengan jumlah yang proporsional dengan populasinya. Demikian dengan perempuan, kehadiran mereka dalam politik menjadi hal yang penting, untuk mewakili perempuan lainnya, mewujudkan kepentingan-kepentingannya.

Perempuan berusaha memperoleh kesetaraan, perlakuan yang adil pada aspek-aspek kehidupan, baik domestik, politik, sosial, ekonomi dan pendidikan. Di tengah arena yang telah diatur dengan adanya kebijakan afirmatif sebagai langkah yang positif yang diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan. Hasil riset disertasi ini menunjukkan, asumsi selama ini tentang perempuan sebagai kodrat yang membawa ketidakadilan dalam relasinya dengan laki-laki dalam berbagai bentuk (Fakih, 2008: 12-13), telah tergeser oleh kesadaran perempuan melalui proses habituasi yang mereka miliki, diawali dengan pemahaman dalam kognitif yang disebut persepsi. Kesenjangan, ketimpangan yang dirasakan perempuan juga berdampak pada habitus perempuan, sehingga, perempuan memunculkan *doxa baru*, yang melihat tentang marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dominasi, sebagai sesuatu yang tidak lagi lazim dikenakan dan ditimpakan untuk perempuan. Doxa baru ini diperlihatkan perempuan kepada khalayak, konstituen, melalui keberhasilan mereka masuk pada dunia politik.

Pada bab ini, akan dideskripsikan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian kedua yakni; apakah terjadi kesenjangan gender bagi perempuan dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah? Pertanyaan ini dijawab dengan memanfaatkan *Gender Analysis Pathway* (GAP), untuk menemukenali terjadinya kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam program-program pembangunan (dalam konteks ini adalah pembangunan politik). Sehingga, identifikasi kesenjangan gender dapat dilakukan, ditemukan permasalahan-permasalahan gender serta menyusun

rekomendasi rekrutmen legislatif yang responsif gender, khususnya di Jawa Tengah. Yang dihasilkan adalah program, arah kebijakan yang berupa rekomendasi aksi agar menjadi proses rekrutmen yang responsif gender. Berikut ini, identifikasi kesenjangan gender dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah dengan mengadopsi analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat oleh perempuan berpolitik di Jawa Tengah.

5.1. Akses Perempuan dalam Rekrutmen Legislatif

Selama proses pengambilan data dalam penelitian, seiring dengan adanya kebijakan afirmasi, semakin ke depan selama ini aktor perempuan memiliki ruang yang lebih luas dalam berpolitik. Akses untuk perempuan berkiprah dalam politik semakin terbuka. Undang-Undang telah memberi jalan bagi perempuan untuk menjadi bagian penting dari proses politik, mulai dari ketentuan UU No. 39 tahun 1999 sampai dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Namun, dinamika regulasi yang memberi peluang keterlibatan perempuan ini masih belum diiringi dengan “kondisi” perempuan di masyarakat Indonesia yang harus menghadapi banyak tekanan berpolitik.

Berdiskusi mengenai akses perempuan menuju proses rekrutmen legislatif di setiap kabupaten, kota dan di tingkat provinsi, selain dipengaruhi oleh regulasi, juga tidak lepas dari pengalaman perempuan dalam berpolitik dan interaksi mereka dengan pihak lain, terbentuk dan dibentuk dalam proses sosial. Proses ini dipengaruhi oleh budaya dalam masyarakat, kondisi sosial masyarakat, bahkan oleh regulasi yang ditetapkan, khususnya yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik. Semua itu membentuk persepsi, pengetahuan dan pikiran perempuan yang bertahan lama

disepanjang rentang waktu tertentu dari kehidupan mereka. Pengalaman mental perempuan dari kondisi-kondisi objektif, diperoleh oleh perempuan saat hadapi dari peristiwa-peristiwa dalam dunia politik. Pengalaman dan pengetahuan perempuan memberi kontribusi terhadap perilaku mereka. Sebaliknya, pengetahuan diperoleh dari tindakan, pengalaman-pengalaman fisik perempuan dan manipulasi lingkungan.

Regulasi memang telah semakin menjamin keberadaan perempuan, namun regulasi juga belum berdampak pada perempuan pada umumnya, pada titik terakhir keberhasilan perempuan dalam arena pemilihan. Dalam proses berpolitik perempuan, banyak hal yang mempengaruhi kegagalan perempuan. Pada tingkat awal, perempuan memang bisa mengakses kesempatan masuk dunia politik, namun pada langkah menuju *finish* banyak perempuan yang gagal. Banyak hal yang menyebabkan akses perempuan ini tidak terbuka lebar. Kurangnya dukungan konstituen pada saat pemilihan, kurangnya modal, tidak adanya dukungan penuh partai politik menjadi persoalan.

Perempuan di Jawa Tengah, berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Sedikit dari mereka yang memiliki sumber daya yang bagus; sumber daya manusia, modal ekonomi dan modal lainnya misalnya. Hal ini disebabkan perempuan di Jawa Tengah kalah *start* berpolitik aktif dibandingkan laki-laki. Perempuan di Indonesia sudah terlalu lama dibiarkan tidak hadir dan terlibat dalam politik di Indonesia, apalagi pengalaman pada masa Orde Baru berjalan tanpa afirmasi terhadap perempuan dalam berpolitik sehingga selama ini pengalaman mereka dalam berpolitik berada di depan jauh dibanding dengan laki-laki.

Fenomena ini memunculkan budaya politik yang berdampak pada terbatasnya ruang praktik politik bagi perempuan. Di awal reformasi, perempuan tidak banyak terlibat dalam kehidupan politik. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki keberanian untuk serius menekuni dunia politik. Salah satunya dikarenakan sumber daya, kapabilitas mereka yang terbatas, selain faktor lainnya. Akibatnya, mereka tidak banyak yang bisa masuk dalam daftar urutan nama calon legislatif yang diusulkan partai politik. Mereka akan berada pada posisi nomor urut yang tidak strategis.

Ketika perempuan sudah banyak belajar, serius menekuni dunia politik didorong oleh kebijakan afirmasi, ditambah dengan berlakunya keputusan MK mengenai penetapan kemenangan calon berdasarkan suara terbanyak, di lapangan perempuan juga masih memiliki kendala. Jarang sekali perempuan mempunyai sumberdaya keuangan. Mengapa keterbatasan sumber daya keuangan menjadi masalah bagi perempuan? Karena ketika berhadapan langsung dengan masyarakat pemilih, perempuan seperti halnya calon legislatif lainnya juga harus bermodal.

Modal untuk kampanye, berkegiatan dengan masyarakat di daerah pemilihan mereka dan sebagainya yang mau tidak mau menjadi kebutuhan bagi perempuan. Sedangkan partai politikpun, tidak bisa berbuat banyak untuk perempuan. Belum lagi persoalan-persoalan pendidikan politik untuk masyarakat yang sangat minim dari berbagai pihak (terutama tanggungjawab negara) untuk meringankan “beban konstruksi gender” yang dialami perempuan. Perempuan masih belum terbantu banyak dalam menghadapi hambatan kultural, yakni budaya politik serta pandangan masyarakat konstuen terhadap kesetaraan gender.

Setelah berlakunya PKPU dalam Pemilu 2014, partai politik memberi peluang kepada perempuan karena ketakutan akan sanksi yang diberikan penyelenggara Pemilu. Yang menyedihkan adalah, perempuan hanya dijadikan sebagai tumbal politik, hanya memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikehendaki partai. Tanpa memberi pendampingan kepada calon perempuan yang telah mereka rekrut. Perempuan hari ini, banyak yang sudah bisa mengakses dan terlibat dalam partai politik. Bahkan, jumlah perempuan di kepengurusan partai politik ada yang sudah seimbang dengan jumlah laki-laki. Namun, kenyataannya mereka belum memiliki *bargaining position* yang kuat. *Zipper System* yang (harusnya menyebut urutan nomor satu dalam daftar caleg diduduki oleh laki-laki, maka urutan dua harus diduduki perempuan, demikian pula sebaliknya) di Indonesia masih setengah hati dilakukan. Sampai dengan Pemilu 2009, yang ingin diterapkan di Indonesia adalah permintaan yang diajukan oleh eksternal partai (Undang-undang Pemilu). Dengan demikian, tidak ada kepastian apakah partai mau melaksanakannya. Terlebih lagi, sifatnya kesukarelaan (*voluntary*), bukan kewajiban (*compulsory*).

Kenyataan ini juga dialami oleh Lina (43 tahun) kandidat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Semarang. Menurut asistennya, kerap kali kandidat yang akan maju kedua kalinya ini kewalahan menghadapi masyarakat di Dapilnya menjelang pemilihan. “Masyarakat sekarang ini, selalu ingin serap aspirasi kalau calon minta dukungan terjun di masyarakat secara langsung”. Demikian kutipan hasil wawancara. Kalau calon perempuan tidak siap, maka yang terjadi dukungan masyarakat tidak akan diberikan. Dari wawancara inilah, kemudian dipahami betapa

perempuan harus siap ketika berhadapan dengan konstituennya. Mental perempuan dimasa kampanye harus kuat menghadapi semua tekanan, bahkan penolakan terhadap dirinya secara terang-terangan karena dianggap tidak mampu memenuhi apa yang dikehendaki masyarakat di saat kampanye.

Akses perempuan dalam memasuki dunia politik di hadapan konstituennya, tergambar di lapangan, dimana perempuan mendapat akses, namun keterlibatan mereka tidak dari awal dipersiapkan oleh partai politik. Mereka hanya difasilitasi untuk memenuhi persyaratan administratif partai politik saja, dan selebihnya, partai terlihat masih belum mau tahu dan belum serius mengawal, memberi jalan bahkan memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan perempuan ketika mereka berjuang keras memenangkan arena rekrutmen legislatif. Pengalaman ini dialami oleh April (22 tahun) seorang kandidat legislator yang akan maju pada Pemilu 2019. Perempuan muda yang direkrut oleh Partai Golkar di Kabupaten Semarang satu tahun sebelum Pemilu ini merasakan betapa akses untuk berpolitik sangat terbuka lebar seiring dengan regulasi. Namun, berdasarkan wawancara mendalam dengan informan, partai tidak banyak memberikan pendampingan ketika yang bersangkutan sudah mulai berhadapan dengan konstituen secara langsung. Kenyataan di lapangan, siapapun memang harus mempunyai modal ketika terjun berpolitik, minimal modal ini digunakan untuk membeli peralatan kampanye bagi calon/ kandidat perempuan dan laki-laki. Akses memang sepenuhnya terbuka oleh regulasi, namun akses ini juga harus diikuti oleh keberdayaan perempuan khususnya ketika berhadapan dengan masyarakat.

Jadi, sampai dengan pelaksanaan Pemilu saat ini, perempuan masih menghadapi persoalan berkaitan dengan akses. Ketimpangan politik terhadap mereka masih saja terjadi. Berbagai permasalahan perempuan, ditemukan oleh peneliti sebagai indikator ketimpangan gender dalam kegiatan yang selama ini dikembangkan mempertimbangkan untuk memberikan akses yang adil bagi perempuan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya. Kesempatan perempuan untuk masuk dalam suatu kegiatan politik karena adanya regulasi yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan, masih belum terhubung satu dengan yang lainnya. Perempuan oleh regulasi memang diberi peluang untuk masuk dalam politik, tapi tidak ada solusi terhadap persoalan yang dihadapi perempuan selama ini yang dilakukan secara komprehensif. Secara konkrit, ketika regulasi melalui Undang-undang dan peraturan lainnya memberi kesempatan, sesungguhnya akses ini harus dibuka dari awal sampai akhir perjuangan perempuan. Namun, tetap saja ada konsekuensi karena rakyat yang memilih langsung dan menentukan siapa calon yang menurut mereka layak. Disini, perempuan dituntut harus mampu menunjukkan pada konstituen bahwa mereka layak untuk dipilih, terutama bagi sesama perempuan yang hendak mereka wakili dan ini merupakan konsekuensi dalam demokrasi.

Dampak dari sistem pemilu, sistem politik, tuntutan demokrasi yang berkenaan dengan kemampuan dan kemandirian ekonomi perempuan sangat memberi pengaruh. Ditambah dengan iklim politik hari ini, adalah iklim politik pasar bebas yang memberi dampak bagi perempuan. Menurut Undang- undang, peserta pemilu adalah partai politik, tapi yang dipilih adalah calon legislatif, orang. Sistem pemilu yang telah

ditetapkan masih saja membuat akses terhadap perempuan ini masih separuh jalan. Pertanyaan ke depan kemudian berkenaan dengan keberlangsungan *affirmative action* terhadap perempuan. Sampai kapan kemudian tindakan afirmasi ini diberikan pada perempuan, jika regulasi yang ditetapkan untuk membuka akses selebar-lebarnya bagi mereka masih belum mampu secara signifikan membantu perempuan dalam dunia politik.

Tabel 5. 1. Ikhtisar Permasalahan Gender pada Aspek Akses

| Data terhimpun dari aspek Akses | Menemukenali permasalahan gender |
|--|--|
| 1. Habitus perempuan | Regulasi, membuka ruang yang luas bagi perempuan. Namun, perempuan masih belum mampu mengakses secara maksimal karena pengalaman, pengetahuan yang kurang dalam arena pemilu, lingkungan yang tidak mendukung secara penuh, budaya patriarkhi kadang membatasi akses perempuan, ketidakpercayaan konstituen yang kurang. Tidak banyak perempuan mempunyai keberanian dalam dunia politik. |
| 2. Arena | Jumlah perempuan yang minim dalam kepengurusan partai politik, mempengaruhi akses selanjutnya dalam politik, tidak kuat dalam bargaining politik, msih dianggap sebagai pelengkap partai dalam pemenuhan sistem zipper yang telah diatur, kurangnya pendampingan partai politik. Sistem pemilu, tuntutan demokrasi menuntut kesiapan yang lebih pada perempuan, sedangkan mereka masih minim pengalaman. |
| 3. modal | Tidak semua perempuan memiliki jejaring politik yang maksimal dalam politik, akibatnya banyak diantara mereka yang masih berperan sebagai pelengkap saja, sehingga mengalami keterbatasan akses, ditambah dengan Kondisi dimana modal ekonomi yang kurang dimiliki perempuan. Pengalaman yang kurang mengelola modal-modal yang ia miliki ditengah hambatan kultural. |

Sumber: data primer diolah (2019)

5.2. Peran/ Partisipasi Perempuan dalam Proses Rekrutmen Legislatif di Jawa Tengah

Terdapat *adigium* dalam perspektif gender yang diusung oleh kaum feminis, yakni perempuan harus dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan termasuk pembangunan politik. Perempuan perlu terlibat di bidang politik, dengan harapan agar disetiap pengambilan keputusan, kebijakan, senantiasa sensitifitas gender hadir. Dengan cara-cara ini, maka nilai-nilai keadilan akan hadir meniadakan diskriminasi struktural dan kultural terhadap perempuan. Inilah point penting dari perlunya peran atau partisipasi perempuan dalam berpolitik. Representasi perempuan hadir, diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik sehingga mereka bisa menyampaikan kepentingan dan aspirasi yang dianggap kurang tersampaikan.

Peran atau partisipasi adalah data yang menunjukkan *knowledge, attitude, practice* dari perempuan dalam proses yang mereka sedang ikuti yakni rekrutmen legislatif perempuan. Bagaimana perempuan memiliki pengetahuan, kesadaran untuk mengambil bagian dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Analisis terhadap peran atau partisipasi perempuan ini dilakukan, mengingat keikutsertaan atau suara perempuan secara kelompok maupun individual --dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan-- sering kali masih belum menjadi pertimbangan atau belum dipertimbangkan dan belum terakomodasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan rekrutmen legislatif.

Beberapa regulasi telah ditetapkan, seperti Undang- undang tentang Partai politik dan Pemilu, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan

sistem. Sistem Pemilu awalnya menggunakan sistem pemenangan berdasarkan nomor urut, kemudian yang berubah menjadi suara terbanyak. Juga, Putusan KPU yang memberikan sanksi pada partai jika mereka tidak disiplin dalam menerapkan sistem selang-seling ketika pengajuan calon legislatif. Regulasi ini, kenyataannya berdampak pada partisipasi perempuan dalam politik di Jawa Tengah. Regulasi selama ini, ditetapkan untuk memberi ruang kepada perempuan dengan 30% (persen) keterwakilan, sehingga arena politik harus memberikan kemungkinan-kemungkinan dan ruang yang nyaman untuk laki-laki dan perempuan untuk terlibat aktif di dalamnya.

Tidak banyak perempuan yang memiliki kesiapan dalam berpolitik, demikian yang peneliti temukan dari data penelitian di lapangan. Jangankan merembes dalam habitus mereka, bahkan pengetahuan secara komprehensif mengenai politik dan modal dan lainnya, berdasarkan wawancara dengan beberapa perempuan (informan pendukung) tidak memiliki kesiapan.

Pengalaman di Jawa Tengah menunjukkan, perempuan sangat rentan dalam politik karena dukungan budaya patriarki yang “selalu” meminggirkan partisipasi perempuan. Budaya *masculinity* selama ini yang menekankan nilai-nilai kelaki-lakian dalam struktur kehidupan masyarakat. Konstruksi masyarakat yang terbangun, dengan adanya pembagian ranah domestik dan publik. Publik selalu dipercaya sebagai ranah dari laki-laki dan ranah domestik yang menjadi bagian dari perempuan. Ideologi hegemoni, di dalam masyarakat patriarki membenarkan penguasaan satu kelompok dominan terhadap kelompok sub ordinat. Perempuan itu individu yang lembut yang

harus dilindungi oleh orang-orang kuat di keluarga mereka. Perempuan harus menerima, setuju dengan apa yang ditentukan oleh kelompok kuat yang dominan sebagai dasar dari pemikiran dalam ideologi yang ada. Dalam menjalankan kehidupan mereka, perempuan tidak *independen* karena setelah menikah kebebasan mereka harus berkurang, perempuan harus patuh pada suami.

Ketidakbebasan perempuan ini karena nilai-simbol kemulyaan hati perempuan Jawa Tengah dikonstruksi oleh adanya ketundukan, kepatuhan, ketergantungan dan kepasrahan perempuan terhadap laki-laki mereka dalam keluarga. Gambaran mengenai dominasi patriarki dalam masyarakat juga diperlihatkan dengan ujaran, perempuan itu *swarga nunut, neraka kathut*. Artinya, kemanapun suami melangkah, melakukan sesuatu, istri mereka akan mendapatkan dampak dari perbuatan yang telah dilakukan oleh sang suami. Ini salah satu nilai yang menjadikan perempuan dalam rumah tangga patuh kepada laki-laki mereka. Kepatuhan perempuan pada suami mereka dalam nilai budaya Jawa adalah mutlak.

Perempuan tetap menjadi “orang berikutnya”, yang berada dalam bayang-bayang laki-laki. Laki-laki menciptakan dan mempertahankan budaya ini, tidak hanya karena mereka mempunyai sumber daya untuk berbuat demikian, namun karena mereka mempunyai kepentingan untuk menjadikan perempuan sebagai orang yang melayani mereka, selalu mengalah, tenaga kerja yang bermanfaat, lambang status dan kekuasaan, menjadi pasangan yang menyenangkan yang dapat menjadi sumber dukungan emosional serta menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan status sosial laki-laki.

Seorang perempuan tidak perlu memiliki jabatan karena mereka secara otomatis akan terangkat derajatnya jika suaminya menduduki jabatan dalam komunitasnya. Dampaknya, istri dalam beraktifitas di luar rumah bahkan ketika mencari pekerjaan harus seijin suaminya. Disinilah, kemudian konsep partisipasi perempuan seringkali tidak terpenuhi secara utuh di dalam masyarakat Jawa Tengah. Yang kemudian muncul adalah perempuan terkonstruksi sebagai individu yang tidak cakap berpolitik, pihak yang tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Perempuan semakin tidak bisa maksimal berperan dalam politik juga dipicu oleh kepemilikan modal perempuan yang terbatas. Tidak banyak perempuan yang mandiri secara ekonomi, terbatas modal ekonomi mereka sehingga ini menjjadi pembatas ruang gerak perempuan berpolitik.

Kenyataannya, perempuan tidak memiliki banyak wewenang untuk mengambil keputusan ketika berada dalam partai politik, karena tidak adanya kesempatan bagi mereka memegang jabatan penting dalam kepengurusan partai politik. Sehingga, meskipun perempuan selama ini jumlahnya bertambah dalam proses rekrutmen, namun seperti yang telah dideskripsikan di atas, partisipasi perempuan masih sangat kurang. Hasil riset menunjukkan, respon publik khususnya partai politik (elite partai di tingkat daerah) kadang berbeda dari apa yang menjadi tujuan regulasi ditetapkan. Partai-partai menuju pelaksanaan Pemilu memang merekrut perempuan, namun hanya sebatas itu mereka mengharapkan partisipasi perempuan. Banyak perempuan yang direkrut dan didaftarkan menjadi calon legislatif, tapi partai politik sering separuh hati dalam melibatkan perempuan. Banyak perempuan yang dilibatkan hanya sebatas administratif

saja, tanpa dibekali dengan ideologi, pendidikan politik, dan sebagainya oleh partai politik.

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan data beberapa perempuan direkrut bukan dari pengurus, bukan anggota, bahkan bukan dari simpatisan partai politik. Kemudian, peran atau partisipasi perempuan dalam partai politik juga masih sangat terbatas ketika menuju proses rekrutmen legislatif di partai politik, perempuan sering tidak bisa menentukan sendiri daerah pemilihannya. Perempuan masih harus berhadapan dengan persoalan penentuan daerah pemilihan, karena partai politik yang maskulin dengan kepengurusan yang banyak diduduki oleh laki-laki, sering memutuskan atau penentuan daerah pemilihan yang tidak menguntungkan bagi perempuan.

Kenyataan berbeda dapat dilihat pada beberapa perempuan informan riset ini. Seiring dengan berjalannya waktu dan didorong oleh adanya dinamika regulasi yang memberi perlindungan terhadap perempuan, serta keinginan perempuan untuk mengambil akses dan berpartisipasi dalam proses rekrutmen legislatif, wacana doxa yang selama ini kuat mengakar pada masyarakat berubah dan luntur. Dampak regulasi ini bagi beberapa perempuan, khususnya perempuan informan yang telah memenangkan proses Pemilu pada beberapa periode, secara umum sangat luar biasa, terutama merubah persepsi perempuan berpolitik. Perempuan menjadi lebih memiliki keberanian untuk masuk ke dunia politik, bahkan memunculkan doksa baru. Doxa baru ini, muncul dari adanya heterodoxy, bahwa perempuan di tengah masyarakat patriarki telah berjuang, mereka menjadi sosok agen atau individu yang cakap politik, mampu

melewati rintangan dalam berpolitik dan terpilih, memiliki elektabilitas yang tinggi di hadapan konstituen mereka ketika terjun pada dunia politik.

Muncul diskursus opini; perempuan menunjukkan pada publik/ masyarakat bahwa perempuan mampu, memiliki performan dan eksis dalam berpolitik. Melalui habitusnya, perempuan meyakinkan publik bahwa mereka memiliki kapabilitas dalam dunia politik. *New Doxa* merembes dalam realitas sosial, mendorong perempuan untuk berpegang pada realita, kebenaran fenomena yang menyandarkan diri pada akal budi dalam bersikap. Dalam doxa yang baru ini, masyarakat diajak berfikir untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Doxa baru, membawa perubahan pada agen perempuan, yakni kesadaran diri bahwa mereka memiliki kemampuan diri, kapabilitas untuk memasuki dunia politik. Doxa baru ini juga memberi kesadaran untuk masyarakat tentang wacana dominan yang terkonstruksi dalam masyarakat Jawa Tengah selama ini terhadap perempuan yang dianggap tidak cakap berpolitik menurut budaya patriarki, telah digugat, tidak mutlak selamanya benar. Konstruksi ini dapat diganggu gugat, dapat didiskusikan serta dapat dikonstruksikan kembali. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa ketika ada kebijakan penambahan jumlah representasi perempuan, belum tentu akan memacu partisipasi perempuan. Seperti halnya Anne Phillips (1998) menjelaskan, bahwa representasi hanyalah aspek lain dari partisipasi, karena dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan. Selanjutnya akan ada beberapa hal seperti budaya patriarki, pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang masih sangat mengikat dan adanya kendala

terhadap akses perempuan terhadap kekuasaan dalam berbagai kelembagaan social dan politik, terutama dalam partai politik dan Pemilu.

Perempuan memang berpartisipasi dalam politik, namun data menunjukkan tentang kontribusi perempuan terhadap kepentingan-kepentingan perempuan dalam berpolitik di Jawa Tengah masih “jauh api dari arang”. Statemen ini tidak boleh diartikan bahwa perempuan dalam berpolitik tidak membawa kepentingan kelompok mereka, namun perempuan memang terkotak-kotak pada kepentingan yang mereka anggap lebih besar, yang mereka sebut sebagai kepentingan partai politik dan kepentingan masyarakat banyak yang seringkali meminggirkan kepentingan-kepentingan mereka (sebagai perempuan). Selain itu, jarang sekali isu-isu keperempuanan “laku”, dianggap *up to date* dalam masyarakat ketika perempuan berkampanye sebelum Pemilu. Isu ini tergerus oleh isu-isu yang menjadi visi-misi partai politik pengusung perempuan.

Demikian juga, perempuan mengalami kesenjangan dalam berpartisipasi dan peran dalam kepemilikan modal khususnya modal ekonomi yang mereka kuasai. Tidak banyak perempuan yang mempunyai modal ekonomi yang cukup dalam arena rekrutmen di Jawa Tengah, karena penguasaan modal mereka banyak yang berasal dari suami, atau anggota keluarga mereka yang lain. Kondisi tersebut agaknya menghambat perempuan ketika mereka ingin lebih memberi peran dalam berpolitik. Di lapangan ditemukan, system lobby di partai politik yang merupakan organisasi swadaya, pembiayaannya berasal dari anggotanya. Artinya, mereka yang memiliki kontribusi

lebih dalam partai politik, akan memiliki akses yang luas dan dapat mengambil peran yang signifikan di dalam partai politik.

5.3. Kontrol Perempuan dalam Proses Rekrutmen Legislatif

Kontrol adalah sebuah analisis mengenai data yang menunjukkan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam proses rekrutmen legislatif. Kondisi perempuan selama ini memiliki perbedaan; tingkat pendidikan, pengetahuan, kecakapan yang semuanya sangat mempengaruhi mereka dalam dunia politik.

Sebagian perempuan yang masuk dalam dunia politik, tidak memenuhi kapabilitas secara individual karena kurangnya kecakapan mereka, walaupun sebagian yang lain mempunyai kemampuan menentukan strategi dan langkah, mengontrol terhadap hal-hal yang terjadi pada mereka. Perempuan tidak menyadari, tidak mengerti dan sulit membedakan apa yang telah mereka alami selama ini. Mereka tidak bisa membedakan bentuk-bentuk relasi kuasa simbolik yang menimpa mereka, dilakukan oleh beberapa pihak. Pengetahuan dan struktur kognitif perempuan juga dipengaruhi oleh pengalaman perempuan ketika menghadapi tekanan. Pengalaman perempuan selama ini dalam menghadapi tekanan-tekanan dalam karier politik mereka, menumbuhkan pemahaman pada perempuan bahwa mereka harus tangguh menghadapi tekanan dari pihak-pihak, aktor dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama.

Kontrol perempuan menjadi hal menarik untuk menganalisis terjadi atau tidaknya kesenjangan terhadap perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Banyaknya tantangan perempuan yang terjadi, misalnya dalam Pemilu sebelum 2009, partai politik terbukti menempatkan calon legislatif perempuan pada nomor urut bawah. Hal ini terjadi kembali pada Pemilu-pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka, dimana perempuan cenderung ditempatkan pada nomor urut 3, hanya untuk memenuhi persyaratan yang sangat minimalis di setiap 3 calon ada 1 perempuan. Realita saat ini, peran nomor urut masih sangat determinan bagi keterpilihan calon legislatif walaupun telah berlaku sistem daftar terbuka, seolah perempuan selama ini dimanfaatkan untuk meraih suara, namun tidak diharapkan untuk terpilih. Daya kontrol perempuan dalam proses rekrutmen politik juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran perempuan tentang pendidikan politik, kaderisasi, yang berdampak pada kualitas dan kuantitas perempuan. Perempuan sampai saat ini lemah dalam mengontrol dan ikut terlibat dalam partai politik akan pencalonan dirinya dari partai politik. Keterlibatan mereka dalam proses penentuan calon legislatif, dan daerah pemilihan untuk mereka juga masih sangat terbatas.

Perempuan dalam dunia politik, harus kuat, bermodal, percaya diri. Pandangan di awal tentang politik yang penuh dengan dominasi, hanya dikuasai dan milik laki-laki harus berubah seiring dengan pengalaman yang dimiliki, pendidikan dan kapabilitas mereka. Seperti halnya yang lazim terjadi dalam kehidupan politik, tekanan sudah dihadapi perempuan sejak awal mereka mulai “serius” dalam dunia politik. Beberapa informan mengemukakan, ketika mereka aktif dalam partai politik, masuk dan terlibat

dalam proses rekrutmen legislatif, tidak semua orang dalam partai politik memberi dorongan. Kepentingan orang bisa saja sama dalam partai, misalnya tahun 2004 semua orang berebut nomor urut. Tekanan akan dihadapi perempuan terlebih dari elite-elite partai laki-laki, dan calon laki-laki dalam partai bahkan dalam pelaksanaan pemilihanpun, perempuan mengalami tekanan. Misalnya informan, yang duduk sebagai calon nomor 1 di Dapilnya memenangkan suara dalam Pemilu tahun 2004. Ia mengatakan, bahwa pasca perhitungan suara dan diputuskan KPU ia yang terpilih dari Dapil tersebut, tidak serta merta keputusan itu selesai. Informan 2 mendapatkan tekanan luar biasa dari calon nomor urut 2 yang memiliki kedudukan sebagai Sekretaris Dewan Syuro. Tekanan juga dialami informan, dari sesama pengurus partai yang lain. Ada pengurus yang merasa sebagai elite dan merasa keberadaannya terancam oleh posisi informan.

Demikian perempuan selalu mengambil pilihan cara-cara untuk memperoleh kekuasaan dengan menyerahkan distribusi kekuasaan pada sekelompok orang atau mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang partai politik sepenuhnya. Bahkan kadang terlepas keinginan perempuan. Sikap-sikap yang tumbuh lama dan berkembang dalam memperjuangkan kepentingan dalam partai politik memberi pengaruh terhadap perasaan perempuan. Perasaan atau ikatan emosional perempuan terhadap sistem politik dalam hal ini partai politik dirasakan sangat kuat berpengaruh terhadap persepsi perempuan. Walaupun kandidat perempuan menghadapi lebih banyak ancaman dan intimidasi daripada kandidat laki-laki ketika keduanya sama-sama berpolitik.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam pada informan mengenai mereka yang menjadi lawan politik perempuan dalam proses rekrutmen, perempuan merasa wajar dalam berpolitik ada “lawan”, termasuk mereka yang separtai politik. Tekanan terhadap perempuan selama ini dalam partai, menjadikan perempuan semakin terbiasa dengan orang-orang di sekelilingnya. Terbiasa dengan tekanan-tekanan yang sering mereka dapatkan dari orang lain. Fenomena, setiap hal yang sering dialami perempuan seperti terungkap di atas, mendorong perempuan untuk kuat. Menurut mereka, sikap yang selama ini mereka miliki dengan mengalah, menunggu dalam proses sosial dan politik tidak dapat selalu dipertahankan. Perempuan ketika diam, menunggu dalam ketidakberdayaan, menjadi bencana bagi mereka yang disadari hal tersebut tidak menguntungkan dalam proses politik berikutnya. Pada masa penentuan nomor urut partai sebagai faktor kemenangan dalam Pemilu, perempuan lebih berhati-hati terutama dengan pengurus se partai. Ketika regulasi telah berubah, perempuan memiliki percaya diri, karena elektoralnya tinggi dan memadai pada setiap Pemilu. Dengan elektabilitas yang tinggi, perempuan tidak begitu reaktif (walaupun waspada tetap dilakukan) terhadap lawan-lawan politiknya terutama terhadap mereka yang sederah pemilihan, separtai politik, maupun berbeda partai politik.

Namun, perempuan lebih memiliki kecenderungan untuk menghindari permusuhan dan perdebatan. Perempuan lebih mengedepankan budaya harmoni, mereka lebih suka menggunakan rasa mereka sesuai cerminan perempuan Jawa Tengah dengan kultur yang kental. Rasa *ewuh pekewuh*, *sungkan* mendominasi perempuan ketika menghadapi orang-orang dan kelompok lain yang se partai politik. Apalagi jika

mereka berhadapan dengan kepentingan elite partai yang sering sekali memiliki kepentingan yang sama dengan sumber daya yang terbatas.

Apa yang terjadi di atas pada perempuan, jika ditelusur lebih jauh tidak lepas dari kebiasaan perempuan yang selalu mengolah rasa. Tidak dapat dipungkiri, kepekaan mereka terhadap fenomena yang terjadi di sekelilingnya kadang diolah dengan rasa, perasaan, hati, bukan oleh dominasi logika berpikir mereka. Informan lainnya dalam wawancara mengungkapkan kesadaran mereka terhadap tekanan-tekanan dalam dunia politik oleh lawan politik dalam proses rekrutmen legislatif selama ini. Penekanan olehnya mengungkap persepsinya terhadap lawan politik; “Perempuan tidak usah punya pikiran untuk menyerang sesama perempuan, jika ingin perempuan itu maju. Perempuan harus lebih rasional menghadapi semua tekanan. Perempuan jangan suka bergosip, membicarakan lawan politiknya untuk menyerang. Selama ini yang terjadi seperti itu dan bagaimana perempuan mau maju?”

Situasi di atas sering terjadi dan itu membuat keinginan perempuan maju dalam ruang politik terhalang. Perempuan seringkali sangat sensitif jika berhadapan dan berseberangan dengan perempuan lainnya dalam politik. Perempuan lebih banyak menggunakan energinya, perasaannya jika sudah berhadapan dengan sesama perempuan. Sesama perempuan ketika berseberangan, akan menimbulkan dampak yang berbeda dengan saat perempuan berhadapan dengan laki-laki.

Tidak jarang, perempuan juga menghadapi tekanan psikis dari koleganya yang perempuan. Yang ironis biasanya, hal-hal yang bersifat pribadi pada diri perempuan menjadi isu-isu yang dimunculkan. Biasanya yang berkaitan dengan; kebiasaan

kultural yang membenturkan peranan domestik dan publik membuat posisi perempuan cenderung dilematis; kepribadian dan perilaku perempuan; hubungan sosial perempuan; dan sebagainya yang seringkali jauh dari hal-hal yang bersifat tidak logis sebagai bahan menyerang sesama perempuan. Apalagi jika serangan berupa fitnah, kampanye hitam ini berupa hal-hal yang berkaitan dengan privasi perempuan, segala sesuatu yang bersifat tidak logis untuk diperdebatkan dan dijadikan sebagai isu-isu berpolitik.

5.4. Manfaat Bagi Perempuan

Analisis ini adalah terkait dengan bagaimana kepentingan-kepentingan politik yang selama ini diperjuangkan dapat tercapai dan mengandung kemanfaatan bagi perempuan dalam arena rekrutmen legislatif. Manfaat adalah data mengenai manfaat hasil pembangunan/ kegiatan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat khususnya untuk perempuan. Apakah perempuan merasakan adanya kemanfaatan dari kegiatan yang selama ini dilakukan? Apakah regulasi yang selama ini ditetapkan membawa kemanfaatan bagi mereka atau sebaliknya? Apakah melalui arena rekrutmen legislatif, perempuan merasakan kemanfaatan? Pertanyaan-pertanyaan ini terjawab melalui analisis hasil penelitian.

Dari hasil penelitian, perempuan merasa bahwa isu gender adalah isu strategis ketika mereka berkampanye di hadapan konstituen, walaupun tidak selalu. Namun, mereka merasa tidak selalu isu ini mereka usung tergantung apa yang menjadi kebutuhan konstituen saat itu. Kiprahnya selama tiga kali menjadi wakil rakyat,

perempuan sering melakukan agenda-agenda kegiatan (baik yang berkenaan dengan tugasnya sebagai wakil rakyat maupun posisinya dalam organisasi masyarakat) untuk meningkatkan peran perempuan. Perempuan juga sering sekali diundang di beberapa kabupaten untuk sosialisasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, memberikan pendidikan politik bagi perempuan, dan calon legislatif perempuan pada partai politik yang mengusungnya. Namun, adakalanya perempuan tidak bisa selalu fokus pada isu-isu keperempuanannya kalau sudah berada dalam arus kepentingan partai politik dan menyangkut keberadaannya dalam pusaran kepentingan masyarakat yang akan mereka wakili.

Di lapangan diperoleh data bahwa kepentingan politik perempuan selama ini telah dituntutkan. Namun, komitmen terhadap kepentingan ini seringkali terabaikan di tengah kontestasi kepentingan antar partai politik di parlemen. Selain itu, selama ini kemanfaatan bagi perempuan juga dipengaruhi oleh hubungan antara pemilih dan calon wakilnya. Sebagai koreksi, bahwa selama ini kebanyakan hubungan antara perempuan kandidat dengan masyarakat ini banyak didasari sebagai hubungan personal dan pragmatis yang tidak didasari pada kepentingan politik yang sama. Persoalan ini semakin tajam, ketika banyak perempuan calon yang menclonkkan diri dalam arena rekrutmen secara tiba-tiba, sebelumnya tidak pernah aktif dalam partai politik dan mengandalkan popularitas mereka saja.

Seharusnya, persoalan di atas dapat teratasi dengan kehadiran partai politik. Namun, partai politik secara kelembagaan seolah absen dalam kontestasi Pemilu. Sedangkan yang hadir selama ini justru kontestasi antar calon legislatif se partai politik

maupun yang berbeda partai politik. Disadari, bahwa kemanfaatan keterlibatan perempuan ini perlu didukung oleh kehadiran partai politik beserta platform dan ideologi yang sekaligus membentuk dan menghadirkan identitas secara kolektif warga.

Dari analisis kesenjangan gender yang mengadopsi langkah-langkah *Gender Analysis Pathway* (GAP) di atas dengan komponen: akses, partisipasi/ peran, kontrol, dan manfaat, diperoleh simpulan bahwa masih terjadi kesenjangan gender bagi perempuan dalam arena, proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Regulasi selama ini memang telah mengatur, memberi ruang dan jalan bagi perempuan, namun kenyataannya pada tataran pelaksanaannya, tafsir dan implementasi regulasi ini masih bercelah. Celah inilah yang selama ini dimanfaatkan oleh elite partai politik, masyarakat dengan kultur patriarki untuk tetap memberi jalan yang sempit bagi perempuan. Disinilah, perempuan yang mempunyai daya juang tinggi, kapabilitas yang tinggi dan modal yang tinggi mampu menghadapi tantangan dan keluar sebagai pemenang.

Bagi perempuan yang masih lemah dalam berpolitik, masih mengalami diskriminasi dalam masyarakat seperti kondisi awal reformasi. Budaya patriarki semakin menekan, sedangkan disisi lain partai politik sebagai rumah berlindung bagi mereka hanya memberi layanan untuk mengantarkan mereka saja ke depan pintu rekrutmen, tanpa bermaksud tetap mendampingi, memberi bimbingan dan bantuan bagi perempuan dalam pemberlakuan sistem Pemilu proporsional terbuka seperti saat ini. Belum lagi perlakuan elite-elite partai politik yang masih senjang menentukan

kepentingan perempuan seperti daerah pemilihan, dan berbagai perlakuan diskriminatif yang lain.

Di bawah ini, ikhtisar permasalahan gender yang ditemukan dalam rekrutmen politik perempuan di Jawa Tengah dari aspek manfaat.

Tabel 5. 2. Ikhtisar Permasalahan Gender pada Aspek Manfaat

| Data terhimpun dari aspek manfaat | Menemukan permasalahan gender |
|--|---|
| 4. habitus | Banyak perempuan yang maju dalam Pemilu, memiliki kondisi; kurang memiliki pemahaman, struktur kognitif yang baik mengenai politik, disebabkan oleh pengalaman yang kurang, pendidikan politik yang masih minim, akses berpolitik sebelum mencalonkan diri sangat terbatas. Akibatnya, banyak diantara mereka yang tidak mengerti isu-isu apa yang harus mereka bawa, visi-misi yang kurang jelas, tidak memiliki habitus sebagai calon wakil rakyat, kurang dikenal dalam masyarakat, mengalami diskriminasi gender dalam pemilihan. |
| 5. Arena | Kurang memahami regulasi pemilu, tekanan bahkan kekerasan simbolik yang bersumber dari budaya patriarkhi, pencalonan masih ada ketergantungan pada elite partai politik sedangkan partai politik masih setengah hati mendorong dan melakukan pendampingan pada perempuan, elite partai politik yang maskulin memiliki kepentingan terhadap keterpilihan mereka yang dipicu oleh sistem proporsional terbuka, dukungan dari sesama perempuan (dalam hal ini pemilih perempuan) masih kurang, pengalaman dari perempuan yang pernah terpilih, kurang mampu membawa aspirasi dan kemanfaatan bagi perempuan. |
| 6. modal | Modal ekonomi yang kurang dimiliki perempuan, menyebabkan tekanan tersendiri bagi perempuan, beberapa orang perempuan, karena karakteristik yang berbeda di setiap daerah, kadang modal ekonomi saja yang bekerja sehingga aspek kemanfaatan bagi perempuan ketika mengikuti rekrutmen politik masih terbatas pada pengembalian modal ekonomi, bukan pada capaian kesejahteraan konstituen pemilihnya. Kurang bekerjanya modal lainnya; modal sosial, modal |

| | |
|--|-----------|
| | simbolik. |
|--|-----------|

Sumber: data primer diolah (2019)

BAB VI

KONSTRUKSI TEORITIK PEREMPUAN DALAM REKRUTMEN

LEGISLATIF DI JAWA TENGAH